

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra

Aditya Bakti, (Bandung,2004)

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010)

Ahmad Sobana, *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan*

Lingkungan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar

Maju, 2003)

Arie S. Hutagalung, *Asas-asas Hukum Agraria, Bahan Perkuliahan*,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-*

Peraturan Pelaksananya, (Bandung: Alumni, 1983)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 1997)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-*

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:

Djambatan, 2003)

E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1996)

Gunanegara, *Hukum Perizinan: Pendapat Hukum Bangunan, fungsi, dan penerapan dan contoh pendapat hakim pada tindak pidana agraria*, (Jakarta: Tatanusa, 2019)

Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria dan Real estate law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)

Irene Eka Sihombing, *Segi segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta, 2017)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem Untuk Pelaku Usaha*, (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2018)

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Negara Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1978)

Lintong Oloan Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, (Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005)

Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001)

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Philipus M. Hadjon, *et.al, Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Philipus M. Hadjon, *et.al, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 1993)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Buku Ketiga)* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI press), 2006

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Kencana, Jakarta, 2011)

Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Paragraf keempat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan Putusan NOMOR 256 K/TUN/2020 Mahkamah Agung

C. JURNAL NASIONAL

Hafid Zakariya, “Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia”, Vol. 10 No. 02, Aceh, Jurnal Serambi Hukum, 2017

H. P. A. Agung, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 9, No. 1, 2021

H. Riyanto, “Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0”, *Jurnal Rechts*

Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap atas Tanah*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal. 141.

Imron Chumaidi, *Panduan Kepemilikan Tanah: Problematika Sertifikasi Tanah Secara Sporadik*, (Semarang: Lawwana, 2022), Vinding: *Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 9, No. 2, 2020.

Made Warka, “Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi”, Vol. XII No. 1, Surabaya, *Perspektif*, 2007

M. Syafiq, “Birokrasi Di Era Revolusi Industri 4.0: (Studi Kasus Pelayanan Perijinan Memulai Usaha di Indonesia)”, *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)* Vol 1, No. 1, 2019

R. Maulana & J. Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol 3, No. 1, 2019.

Said, Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. ”*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.4 2015

S. Al Huzni, & Y. A. Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia”, *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Vol 15, No. 1, 2021

D. WEBSITE

Fathkhulamien, “Tujuan Omnibus Law Diterapkan Pemerintah”,

<https://www.unisbank.ac.id/v2/news/tujuan-omnibus-law-diterapkan-pemerintah/>, diakses Pada 10 Mei 2023

Kementerian Investasi/BKPM, “Persyaratan Dasar Memperoleh Perizinan Berusaha”,

<https://.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1>, diakses pada 25 Maret 2023

Retno Kusniati Helmi, Fitria, “Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi

Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 50, No. 1, 2021, hal 24–35, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33736>,

diakses pada 24 Maret 2023

Taufiq Hidayatullah, “UU Cipta Kerja: Sentralisasi Kewenangan Dan Berkurangnya Pendapatan Daerah”. [https://lokadata.id/artikel/uu-](https://lokadata.id/artikel/uu-cipta-kerja-sentralisasi-kewenangan-dan-berkurangnya-pendapatan-daerah)

[cipta-kerja-sentralisasi-kewenangan-dan-berkurangnya-pendapatan-daerah](https://lokadata.id/artikel/uu-cipta-kerja-sentralisasi-kewenangan-dan-berkurangnya-pendapatan-daerah), diakses pada 27 April 2023